



# The 18th Session of the Conference of the PUIC and Related Meetings

Abidjan - Republic of Cote D'Ivoire  
2-5 Maret 2024

**THE HOUSE OF REPRESENTATIVES  
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA  
2024**





**LAPORAN  
DELEGASI DPR RI**

**18TH SESSION OF THE PUIC CONFERENCE**

**ABIDJAN, PANTAI GADING  
2 – 5 MARET 2024**





## LAPORAN KEGIATAN DELEGASI BKSAP DPR RI 18<sup>TH</sup> SESSION OF THE PUIC CONFERENCE

ABIDJAN, PANTAI GADING  
2 – 5 MARET 2024

### I. PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Konferensi Persatuan Parlemen Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam atau *Parliamentary Union of the Organisation of Islamic Cooperation (PUIC)* yang ke-18, bertema “*Climate Change In The World: How Can Puic Member States Respond?*” telah diselenggarakan di Abidjan, Pantai Gading pada tanggal 2-5 Maret 2024.

Konferensi PUIC tersebut merupakan rangkaian persidangan dari berbagai alat kelengkapan organisasi yaitu:

1. *Executive Committee*
2. *PUIC Association of Secretaries-General*
3. *PUIC General Committee*
4. *Standing Specialized Committee on Political Affairs and Foreign Relations*
5. *Standing Specialized Committee on Economic Affairs and Environment*
6. *Standing Specialized Committee on Human Rights, Women and Family*
7. *Specialized Standing Committee on Cultural and Legal Affairs and Dialogue of Civilizations and Religions*
8. *Standing Committee on Palestine*
9. *Conference of Muslim Women Parliamentarians*

Partisipasi dan kehadiran Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR RI) di konferensi PUIC ke-18 di Abidjan, Pantai Gading tersebut merupakan manifestasi diplomasi parlemen, yaitu salah satu fungsi DPR dalam kerangka mendukung pelaksanaan diplomasi yang dijalankan Pemerintah RI.



Fungsi diplomasi tersebut didasarkan kepada Pasal 68 dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,<sup>1</sup> yang menggarisbawahi peran DPR RI yang sebagai lembaga negara dan mempunyai fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat, dan juga untuk mendukung upaya Pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Sehubungan dengan Undang-Undang tersebut, Pasal 4 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib juga menggarisbawahi fungsi dari DPR RI, yaitu pengawasan, penganggaran, legislasi yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat dan juga untuk mendukung upaya Pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ini, Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) sebagai Alat Kelengkapan DPR RI diberikan mandat untuk menjalankan diplomasi parlemen yang lebih jauh di Pasal 116 UU MD3 dan Pasal 82 Tata Tertib DPR RI Tahun 2020 disebutkan bahwa BKSAP mempunyai tugas untuk membina,

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah beberapa kali diubah yaitu : Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



mengembangkan dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara DPR dan parlemen negara lain, baik secara bilateral maupun multilateral termasuk organisasi internasional yang menghimpun parlemen dan/atau anggota parlemen negara lain.

## B. Dasar Pengiriman Delegasi

Partisipasi Delegasi DPR RI di Konferensi PUIC ke-18 ini berdasarkan:

1. Surat Nomor MP-18CONF/23-188 tanggal 21 November 2023 dari Sekretaris Jenderal PUIC Mouhamer Khouraiichi NIASS kepada Ketua DPR RI perihal Undangan untuk menghadiri Konferensi PUIC ke-18 yang diselenggarakan di Abidjan, Pantai Gading.
2. Surat Tugas Nomor 02/KU.05.01/KSOI/ST/02/2024 tentang Perjalanan Dinas dalam kerangka menghadiri Konferensi PUIC ke-18 di Abidjan, Pantai Gading.

## C. Susunan Delegasi

Adapun susunan dan komposisi Delegasi DPR RI ke *18<sup>th</sup> Session of the PUIC Conference* adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Fraksi / No. Anggota	Jabatan
1.	Dr. Fadli Zon, SS, M.Sc.	F-P.Gerindra/A-86	Ketua BKSAP /Ketua Delegasi
2.	Ir. Hugua	F-PDIP/A-259	Anggota BKSAP /Anggota Delegasi
3.	Drs. Fathan Subchi Badawi	F-PKB/A-18	Anggota BKSAP /Anggota Delegasi

Selama persidangan berlangsung, Delegasi DPR RI didampingi oleh Pejabat dan Staf Setjen DPR RI, Tenaga Ahli BKSAP, serta Pejabat dan Staf Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Senegal merangkap Gambia, Guines, Guinea-Bissau, Mali, Pantai Gading, Cape Verde, dan Sierra Leone.

## D. Maksud dan Tujuan Pengiriman Delegasi

### 1. Maksud

Maksud dari pengiriman Delegasi DPR RI mengikuti Konferensi PUIC ke-18 yaitu:

- a. Menjalin persahabatan dan memperkuat kerja sama internasional maupun bilateral dengan Parlemen Anggota PUIC;
- b. Berkontribusi kepada forum PUIC agar menghasilkan resolusi-resolusi positif, responsif, konstruktif, dan implementatif terhadap pelbagai tantangan global secara umum dan dunia Islam secara khusus;



- c. Manifestasi diplomasi parlemen DPR dalam konteks negara-negara OKI;
- d. Menegaskan urgensi konsep shura sebagai nilai dasar ajaran Islam dan memberikan perspektif unik terhadap demokrasi.

## 2. Tujuan

Adapun tujuan pengiriman Delegasi DPR RI ke Konferensi PUIC ke-18 adalah:

- a. Berpartisipasi dan berperan dalam Konferensi PUIC untuk menguatkan diplomasi parlemen Indonesia dan melaksanakan mandat dari UU MD3 untuk mendukung upaya Pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Berpartisipasi dan berperan dalam Konferensi PUIC untuk pemanfaatan yang efektif dari pembayaran kontribusi tahunan yang dibayarkan oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia/Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia.
- c. Memainkan peran strategis sebagai negara Muslim yang mempunyai penduduk Muslim terbesar di dunia untuk berkontribusi dalam memberikan sumbangsih pemikiran strategi dalam merespon berbagai tantangan yang dihadapi oleh negara-negara anggota PUIC.
- d. Menegaskan peran strategis DPR sebagai fondasi penting dari negara demokrasi terbesar di dunia Islam.

## E. Misi Delegasi

Delegasi DPR RI ke Konferensi PUIC ke-18 mengemban misi untuk:

- a. Memperjuangkan posisi DPR RI terkait resolusi-resolusi dalam sidang PUIC.
- b. Mendiskusikan hubungan antara Indonesia dengan parlemen negara anggota PUIC dalam kerangka bilateral maupun multilateral.
- c. Memperjuangkan pemenuhan Hak Asasi Manusia bagi masyarakat Palestina dengan mendorong terwujudnya gencatan senjata, bantuan kemanusiaan yang tanpa hambatan, dan penghentian okupasi yang dilakukan oleh Israel atas tanah Palestina.

## F. Persiapan Pelaksanaan Tugas

Serangkaian kegiatan atau aktifitas, termasuk persiapan teknis dan substansi, telah dilaksanakan pada masa persiapan partisipasi Delegasi DPR RI pada Konferensi PUIC ke-18 di Abidjan, Pantai Gading.

Dalam hal tersebut, Sekretariat BKSAP menyiapkan sarana dan prasarana yang mendukung Delegasi DPR RI dalam berpartisipasi dan menghadiri Konferensi tersebut. Selain itu, Sekretariat BKSAP bersama Tenaga Ahli BKSAP telah menyusun draf resolusi yang diusulkan, intervensi dan posisi delegasi DPR RI secara menyeluruh.



## **G. Anggaran**

Kegiatan partisipasi Delegasi DPR RI pada Konferensi PUIC ke-18 ini menggunakan anggaran APBN dari anggaran perjalanan dinas yang telah dialokasikan pada DIPA Satuan Kerja Dewan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 1.120.304.900 (Satu miliar seratus dua puluh juta tiga ratus empat ribu sembilan ratus rupiah)





## II. ISI LAPORAN

Konferensi PUIC ke-18 yang bertajuk "*Climate Change in the World: How Can PUIC Member States Respond?*" telah diselenggarakan di Abidjan, Pantai Gading pada tanggal 2-5 Maret 2024 dengan tuan rumah Parlemen Pantai Gading dan dihadiri oleh delegasi Parlemen Anggota PUIC termasuk Indonesia.

Berikut rangkaian Konferensi PUIC ke-18 yang diikuti Delegasi Indonesia:

1.	<i>Executive Committee</i>
2.	<i>PUIC General Committee</i>
3.	<i>Standing Committee on Palestine</i>
4.	<i>Consultation Meeting of the Asian Group</i>
5.	<i>Standing Specialized Committee on Political Affairs and Foreign Relations</i>
6.	<i>Standing Specialized Committee on Human Rights, Women and Family</i>
7.	<i>Specialized Standing Committee on Cultural and Legal Affairs and Dialogue of Civilizations and Religions</i>
8.	<i>Conference of Muslim Women Parliamentarians</i>
9.	<i>The 18<sup>th</sup> PUIC Conference</i>

### 1. The 51<sup>st</sup> meeting of the PUIC Executive Committee

Di sesi pertemuan ke-51 *Executive Committee* (EXCOM) PUIC yang dihelat pada 2 Maret 2024, tercatat 14 anggota EXCOM ikut menghadiri termasuk Indonesia. EXCOM sendiri dipimpin Adama Bictogo, Ketua Parlemen Pantai Gading.

Adapun negara-negara yang ikut menghadiri adalah: Pantai Gading, Aljazair, Indonesia, Bangladesh, Burkina Faso, Chad, Iran, Lebanon, Maroko, Mozambik, Oman, Saudi Arabia, dan Turkiye. Sementara anggota EXCOM yang tidak ikut menghadiri adalah Azerbaijan dan Niger.

Penting dicatat bahwa pertemuan EXCOM menetapkan Fadli Zon terpilih secara aklamasi sebagai Wakil Presiden persidangan EXCOM.

Pada pertemuan tersebut Sekjen PUIC menyampaikan apresiasi kepada Parlemen Pantai Gading dan Ketua Parlemen Aljazair sebagai Presiden PUIC ke-17 yang telah berupaya mewujudkan tujuan PUIC.

Pada sisi lain Sekjen menegaskan bahwa situasi di Jalur Gaza saat ini merupakan kejahatan perang dan genosida. Ia juga memuji inisiatif Afsel yang mengajukan tuntutan kepada ICJ sembari meningkatkan kembali bahwa solusi krisis di Palestina merupakan jaminan keamanan dan stabilitas global.



Terakhir, Sekjen menyampaikan juga bahwa perubahan iklim menjadi tantangan global yang harus diatasi umat manusia secara tegas dan efektif.

Sementara Ketua Parlemen Pantai Gading menyoroti tiga tantangan global yaitu ekstrimisme, perubahan inkonstitusional dan isu Palestina.

EXCOM kemudian memutuskan semua agenda persidangan dan komisi-komisi



## 2. 25<sup>th</sup> Session of the PUIIC General Committee

Pertemuan ini diselenggarakan pada 4 Maret 2024 dan dihadiri delegasi dari: Aljazair, Bangaldesh, Benin, Burkina Faso, Chad, Pantai Gading, Djibouti, Mesir, Gambia, Gabon, Guinea, Indonesia, Iran, Irak, Lebanon, Uganda, Turkiye, Tunisia, Suriah, Somalia, Siera Leone, Senegal, Saudi Arabia, Qatar, Palestina, Oman, Nigeria, Mozambik, Maroko, Mauritania, Mali, Malaysia, dan UAE.

Pertemuan dibuka oleh Sekjen PUIIC untuk selanjutnya agenda pertemuan dipimpin oleh delegasi Pantai Gading dengan Wakil Ketua pertemuan masing-masing dari Mauritania dari Grup Arab dan Indonesia dari Grup Asia.

Pertemua mengadopsi semua dokumen selama persidangan PUIIC ke-18 di Pantai Gading, termasuk laporan keuangan PUIIC dan anggaran PUIIC berikutnya yang nilainya tidak ada perubahan atau sama dengan anggaran PUIIC 2023.

Pada pertemuan tersebut Delegasi Arab Saudi menyampaikan keprihatinan terkait jumlah tunggakan kontribusi finansial anggota PUIIC dan mengharapakan PUIIC dapat menyelesaikan masalah tunggakan tersebut.



Pada pertemuan tersebut terpilih Delegasi Bahrain dan Turkiye sebagai pihak yang akan mengaudit anggaran PUIC tahun 2024-2025.

### **3. Agenda of the 12<sup>th</sup> Meeting of the PUIC Standing Committee on Palestine**

Pertemuan ini diselenggarakan pada 2 Maret 2024 dan dihadiri delegasi dari: Aljazair, Burkina Faso, Pantai Gading, Djibouti, Mesir, Guinea, Indonesia, Iran, Lebanon, Malaysia, Maroko, Mozambik, Palestina, Senegal, Suriah, Turkiye, Tunisia, dan UAE. Pertemuan dipimpin Najib Al-Qoddoumi, Ketua Delegasi Parlemen Palestina.



Ketua BKSAP DPR RI Dr. Fadli Zon (tengah) hadir di sesi 12th meeting of the PUIC Standing Committee on Palestine. **Dok: BKSAP**

Parlemen Qatar, Tunisia, dan Suriah ditetapkan sebagai anggota baru Komisi Palestina. Pada sisi lain, sesuai Tata Tertib, keanggotaan Sudan, Guinea, dan Kamerun dibatalkan karena ketidakhadiran dalam beberapa pertemuan Komisi Palestina.

Pertemuan juga menetapkan laporan pertemuan Komisi Palestina ke-11 di Aljazair yang diselenggarakan pada 26 Januari 2023.

Sebagai pimpinan persidangan, Delegasi Palestina menyampaikan antara lain:

- Netanyahu tengah melakukan empat fase yaitu: penghancuran total infrastruktur, pembunuhan dan penangkapan ribuan warga Palestina di Jalur Gaza dan Tepi Barat, pengusiran warga Palestina secara paksa ke Mesir dan Yordania, dan membuat warga Palestina kelaparan dengan menyerang bantuan kemanusiaan.
- Mengkritik AS yang mengirim suplai militer untuk Israel
- Pada tahun 1948 Israel telah melakukan pembantaian terhadap warga Palestina lebih dari 50 kali



- Mengingatkan bahwa terdapat lebih 700 resolusi yang telah diadopsi UNGA namun semuanya masih belum diimplementasikan.

Pada pertemuan tersebut semua delegasi menyampaikan berbagai pandangan termasuk Delegasi Indoensia. Sejumlah pandangan dari puluhan negara PUIC yang mengemuka menyoroti situasi memburuk di Jalur Gaza Palestina.



Delegasi DPR RI Dr. Fadli Zon (tengah), Hugua (kiri) dan Fathan Subchi (kanan) saat hadir di salah satu sesi Sidang PUIC ke-18. Dok: BKSAP

Adapun posisi yang disampaikan Indonesia adalah sebagai berikut:

- Kendatipun perubahan iklim akan menjadi tema utama Konferensi ini, peserta PUIC ke-18 tidak boleh membiarkan perjuangan Palestina diabaikan karena berbagai alasan, termasuk penembakan baru-baru ini oleh Israel terhadap kerumunan warga Palestina yang berlomba-lomba menarik makanan dari konvoi bantuan di Jalur Gaza yang menewaskan sedikitnya 112 orang.
- Menyindir respons masyarakat global terkait penembakan Israel terbaru tersebut yang sebatas kecaman. Disampaikan juga insiden tersebut merupakan kejahatan global paling kejam dan tidak tersentuh hukum yang pernah terjadi di era modern.
- Memperingatkan bahwa pemandangan serangkaian kekejaman Israel yang terus disaksikan dunia sementara DK PBB dan komunitas global lainnya tidak bisa berbuat banyak.
- Mengingatkan agar tidak berhenti membicarakan perjuangan Palestina. Hal ini karena menyangkut kemanusiaan dan hak asasi manusia yang sangat mendasar termasuk kebebasan bagi rakyat Palestina.



- Harus mencari banyak cara mengambil langkah konkret untuk melindungi warga Palestina yang tidak berdaya dan untuk mengembalikan hak-hak dasar mereka.
- Di antara langkah konkret adalah mendesak Mahkamah Internasional (ICJ) untuk mengambil keputusan yang bersifat final, bukan sementara, dan mengikat terkait gugatan Afrika Selatan di ICJ yang menuduh Israel melakukan genosida di Gaza.
- Mengakui bahwa nasib keputusan ICJ akan sangat tergantung DK PBB. Oleh karena itu, diharapkan PUIC berperan sebagai poros kampanye global untuk menuntut segera dilakukannya reformasi DK PBB. Reformasi DK PBB mutlak. Jika tidak, dunia akan kehilangan kepercayaan dan membiarkan setiap negara mengambil tindakan sepihak dan itu bukanlah sebuah pilihan.
- Menyerukan intensifikasi dan perluasan gerakan *Boycot Divestment and Sanction* (BDS) yang bertujuan melemahkan Israel secara sosial, politik, dan ekonomi. Dalam konteks ini, bisa dijadikan sebuah gagasan berdampak jika negara-negara Muslim kaya minyak memboikot pasokan minyaknya ke Israel dan sekutu terdekatnya. Ini merupakan terobosan yang akan menjadi tamparan yang sangat menyakitkan dan keras. Dalam konteks ini yang diperlukan adalah keberanian.
- Meminta negara-negara Anggota PUIC bersatu untuk memastikan bahwa perjuangan Palestina selalu mendapat dukungan penuh dalam pertemuan-pertemuan di forum parlemen global atau *Inter-Parliamentary Union* (IPU), antara lain meminta masing-masing Negara Anggota PUIC untuk menetapkan rancangan resolusi mereka sendiri mengenai permasalahan Palestina untuk diajukan sebagai item darurat pada Majelis Umum IPU.
- Mengusulkan PUIC meluncurkan 'Kampanye Kemanusiaan Parlemen Islam Global untuk Rakyat Gaza,' dalam upaya memobilisasi akses bantuan kemanusiaan global tanpa hambatan bagi masyarakat Gaza.

Pada kesempatan tersebut Sekretariat PUIC menyampaikan gagasan *Palestine Award* yang sebelumnya dimandatkan saat konferensi di Aljazair agar gagasan tersebut untuk dipersiapkan.

Pertemuan kemudian menyetujui regulasi-regulasi terkait *Palestine Award*.

Pertemuan juga mengadopsi resolusi-resolusi yaitu the Situation in Palestine, the Situation in the Gaza Strip and its Surroundings, the Role of Islamic Parliaments in Standing against the Israeli Plans for the Judaization of Al-Quds, dan the Occupied Arab Territories in Syria and Lebanon.

#### **4. Consultation Meeting of the Asian Group**

Pada pertemuan Grup Asia yang digelar pada Minggu tanggal 3 Maret 2024, Ketua Delri ditunjuk untuk memimpin pertemuan. Sejumlah negara Asia yang



tergabung dalam grup ini mendiskusikan representasi Asia di sejumlah organ strategis PUIC.

Dalam pertemuan tersebut Indonesia mengajukan DPR RI sebagai tuan rumah penyelenggaraan Konferensi PUIC ke-19 tahun 2025. Pengajuan tersebut disepakati untuk kemudian akan mendapat persetujuan di Sidang General Committee.

Delegasi Parlemen Indonesia mewakili Asian Group ditetapkan menduduki keanggotaan di berbagai organ PUIC tahun 2024 yaitu di Komisi Politik dan Luar Negeri dan Komisi Ekonomi dan Lingkungan.



## **5. Sidang Komisi Khusus terkait Politik dan Luar Negeri**

Persidangan dihelat pada 3 Maret 2024 dan dibuka oleh Deputy Sekjen PUIC Ali Asghar Mohammadi.

Negara-negara anggota komisi yang menghadiri persidangan adalah: Aljazair, Indonesia, Iran, Uganda, Turkiye, Suriah, Senegal, dan Palestina. Sementara dua anggota lain yang tidak ikut menghadiri adalah Kamerun dan Kuwait.

Persidangan melakukan pembahasan draf-draf resolusi yang diajukan oleh Komisi Palestina, Komisi Muslim Minoritas, dan dua dua resolusi terkait Situasi di Sahel, Chad, Cekungan Danau Chad, dan beberapa Negara sekitar.

Setelah mempelajari dan mendiskusikan resolusi-resolusi tersebut, pertemuan menyepakati untuk membawa draf-draf resolusi tersebut ke Konferensi PUIC ke-18.



Para anggota komisi meminta Sekretariat PUIC agar menerbitkan ringkasan resolusi-resolusi terpenting khususnya yang berkaitan dengan isu Palestina di laman resmi PUIC.

Komisi ini secara keseluruhan mengadopsi 16 resolusi.

## **6. Sidang Komisi Khusus terkait Hak Asasi Manusia, Perempuan dan Keluarga**

Pertemuan komite Hak Asasi Manusia, Perempuan dan Keluarga ke-10 dilaksanakan pada tanggal 3 Maret 2024. Pertemuan ini Hon. Elza Richtuelle Boukandou, Anggota Parlemen Republik Gabon.



Rapat tersebut dihadiri oleh perwakilan negara-negara dari Kelompok Arab, seperti Kerajaan Bahrain, Uni Emirate Arab, Oman, dan Negara Palestina; Grup Asia, seperti Republik Islam Iran, Republik Indonesia, Bangladesh, dan Malaysia; Dan Grup Afrika, seperti Pantai Gading, Gabon, Mauritania, Republik Kamerun, Republik Mali, Republik Mozambik Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh beberapa parlemen non-anggota Komite: Aljazair, Chad, Kuwait dan Maroko.

Pertemuan tersebut meninjau sejumlah agenda item, termasuk draf resolusi, sebagai berikut:

1.	Election of the Rapporteur
2.	The Ongoing Human Rights Violations against Rohingya Muslims in Myanmar



3.	Ongoing Human Rights violations in the Indian Occupied Jammu and Kashmir.
4.	Coordination in International and Regional Fora on Human Rights Issues among Representatives of the States of the PUIC Member
5.	Enhancing the Role of Women in all Development Aspects in PUIC Member States
6.	Preventing the Exploitation of Women in Commodity Promotion.
7.	The Participation of Women in the Delegations of the PUIC Conferences
8.	Promoting the Status of Youth in the Islamic World.
9.	Child Care and Protection in the Islamic World.
10.	Role of Islamic Parliaments in Promoting Basic Health among PUIC Member States
11.	Custody Problems of Muslim Migrant Families wherever they maybe, particularly in Europe.
12.	Protecting Muslim Women and Children in areas under occupation and conflict
13.	Enhancing Equality and Renunciation of Violence, in Respect of the Principle of Citizenship That is Not in Contradiction of Islamic Sharia
14.	Impact of Natural Disasters on Women
15.	Rejecting of the Resolution of the Human Right Council on Sexual Inclination and Sexual Identity
16.	Advancing Social and Economic Rights to Achieve an Inclusive COVID-19 Recovery (Diajukan oleh delegasi DPR RI)
17	Mental Health and Psychological Needs of People Affected by Armed Conflicts, Natural Disasters and other Emergencies

Pada sesi ini delegasi Indonesia menyampaikan perlunya dorongan untuk tercapainya gencatan senjata dan perdamaian di Gaza, Palestina. Hal ini menimbang jumlah terbesar korban dari agresi Israel tersebut adalah perempuan dan anak-anak. Tidak hanya seruan gencatan senjata, delegasi Indonesia yang diwakili oleh Drs. Fathan Subchi Badawi dan Ir. Hugua menyerukan aksi bersama untuk memenuhi hak dasar rakyat Palestina, terutama untuk perempuan dan anak-anak. Di dalam forum ini, Indonesia juga terus berkomitmen untuk terus menyuarakan terwujudnya perlindungan hak perempuan dan juga mendorong kesetaraan gender di berbagai bidang.



## **7. Sidang Komisi Khusus terkait Kebudayaan dan Hukum Serta Dialog Peradaban dan Agama**

Pertemuan Komisi Khusus terkait Kebudayaan dan Hukum Serta Dialog Peradaban dan Agama yang ke-10 diadakan pada tanggal 3 Maret 2024 dan dipimpin oleh Parlemen dari Republik Islam Mauritania.

Pada sesi pertemuan ini, hadir delegasi parlemen dari negara yang mewakili Kelompok Asia yakni, Republik Iran, Republik Indonesia, dan Malaysia;; mewakili Kelompok Arab yakni, Uni Emirate Arab dan Republik Turkiye; Kelompok Afrika diwakili oleh negara Republik Pantai Gading, Republik Islam Mauritania, Republik Guinea, Republik Senegal.

Pertemuan tersebut meninjau sejumlah agenda item, termasuk draf resolusi, sebagai berikut:

1.	Promoting Dialogue among Civilizations with special emphasis on facing Western Campaigns against Islamic values
2.	Alliance of Civilizations
3.	Protection of Al-Aqsa Mosque against Zionist Israeli threats
4.	Protection of Holy Places in Muslim and non-Muslim States
5.	Effective Countering of the Phenomenon of Islamophobia

Delegasi Indonesia yang diwakili oleh Ir. Hugua menyampaikan dalam forum ini bahwa komentar-komentar menghina Islam ataupun agama lain adalah tindakan yang tidak dapat diterima, sayangnya, hal ini masih menjadi tantangan bagi kita semua. Hal ini sangat memprihatinkan jika pernyataan atau pernyataan tersebut juga dibuat oleh politisi dari negara lain, yang dapat menyebabkan kekerasan, kebencian dan perpecahan di kalangan warga sipil – dan lebih jauh lagi, menciptakan ketidakstabilan yang juga dapat berdampak pada perekonomian. Ir. Hugua juga prihatin dengan semakin banyaknya pembakaran Al-Quran di negara-negara Eropa, seperti Swedia dan Denmark. Insiden seperti itu memicu kemarahan dan keresahan masyarakat di banyak negara.





Anggota BKSAP DPR RI Hugua menyampaikan intervensi pada Sidang Komisi Khusus Kebudayaan dan Hukum serta Dialog Peradaban dan Agama. Dok: BKSAP

Delegasi Indonesia menekankan bahwa semua negara harus mengambil kebijakan internal yang tegas atau tindakan lain yang diperlukan yang melarang warga negaranya atau tokoh politiknya menyampaikan komentar atau pernyataan yang menghina dan anti-Islam baik di depan umum maupun pribadi. Delegasi Indonesia juga berpandangan bahwa perlunya untuk memastikan bahwa pejabat pemerintah di semua negara memahami sepenuhnya standar dan prinsip hak asasi manusia, sehingga mereka sadar dan menyadari bahwa menghasut kebencian agama tidak diperbolehkan dalam segala situasi.

#### **8. Konferensi ke-11 Anggota Parlemen Perempuan Muslim**

Konferensi ke-11 Anggota Parlemen Perempuan Muslim dilaksanakan pada tanggal 4 Maret 2024 dan menjadi salah satu sesi ke-18 Konferensi PUIC. Sidang ini hanya boleh dihadiri oleh anggota parlemen perempuan dari negara anggota PUIC. Pada Konferensi PUIC ke-18 ini, tidak ada anggota parlemen perempuan dari Delegasi Indonesia sehingga Indonesia tidak menghadiri konferensi tersebut.

Namun demikian, pihak Perwakilan KBRI Senegal ikut mengikuti proses konferensi tersebut.

#### **9. Konferensi PUIC ke-18**

Delegasi DPR dipimpin Ketua BKSAP menghadiri agenda puncak pertemuan PUIC yaitu Konferensi PUIC ke-18 yang diselenggarakan pada 5 Maret 2024.



Semua delegasi termasuk Indonesia diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangannya terkait tema yang diusung yaitu *Climate Change in the World: How Can PUIC Member States Respond?*



Berikut pokok-pokok yang disampaikan Indonesia di sesi konferensi:

- Mengingatkan kembali keprihatinan atas genosida yang terus berlanjut di Jalur Gaza.
- Menegaskan bahwa dinamika tahun 2024 akan sangat fluktuatif dengan ditandai perhelatan pemilu di 70 negara yang akan menjadi ujian bagi sistem demokrasi. Demikian pula ditandai oleh dampak dari berbagai konflik yang terjadi khususnya di Palestina dan perang di Ukraina yang memicu ketidakstabilan global yang akan membentuk dunia yang berada dalam pergolakan pergeseran kekuasaan global dan kebangkrutan nyata dalam hal kemanusiaan dan hak-hak dasar serta moralitas.
- Menggarisbawahi ancaman persaingan geopolitik, transisi ramah lingkungan dan digital, perubahan iklim, dan keamanan internasional.
- Mengapresiasi tema konferensi yang mengusung tema perubahan iklim sebagai tema pertama sepanjang sejarah konferensi PUIC meskipun di tengah kecaman atas ketidakmampuan komunitas global menghentikan genosida Israel terhadap warga sipil di Jalur Gaza.
- Inisiatif tema perubahan iklim menjadi lebih penting dari sebelumnya. Hal ini karena dampak perubahan iklim semakin meningkat secara tidak terduga. Pemandangan banjir dan badai ekstrem menunjukkan betapa besar pengaruh cuaca dan iklim terhadap hampir setiap aspek kehidupan



manusia, mulai dari sumber makanan hingga kesehatan, dan masa depan dunia secara umum.

- Mengingat tren global mengenai berkurangnya literasi iklim, khususnya dalam memahami isu-isu penting mengenai iklim, tindakan, kebijakan iklim, dan institusi. Meskipun ada kekhawatiran yang meluas mengenai perubahan iklim, ternyata masih terdapat kurangnya pengetahuan mendalam tentang iklim di kalangan masyarakat termasuk komunitas Muslim global.
- Menekankan komunitas Muslim global harus memiliki pengetahuan mendalam mengenai dampak buruk perubahan iklim yang antara lain menyebabkan sebagian Afrika Timur mengalami kekeringan terburuk dalam 40 tahun terakhir, yang menyebabkan lebih dari 20 juta orang berisiko mengalami kelaparan parah.
- Negara Anggota PUIC mutlak dituntut untuk mempersiapkan segala kebutuhan dalam rangka penguatan literasi iklim masyarakat. Misalnya, mereka dapat mengadopsi undang-undang nasional untuk melembagakan kampanye literasi iklim.
- Urgensi penegakan tatanan dunia berdasarkan keadilan untuk menjamin dunia yang lebih aman dan stabil. Dunia sekarang semakin membutuhkan dunia tanpa kemunafikan, standar ganda, dan 'tidak ada moralitas'.
- Adalah akan sulit untuk berhasil mengatasi perubahan iklim karena sebagian masyarakat lebih memilih mengambil tindakan sepihak karena hilangnya kepercayaan mereka terhadap mekanisme tatanan global saat ini, yang diduga ditandai dengan standar ganda dan tindakan munafik seperti yang dilakukan oleh masyarakat. serta perilaku tidak bermoral yang dilakukan oleh negara-negara paling kuat.
- Terjadinya genosida dan pemusnahan warga sipil di Gaza adalah bukti baru dari ketidakadilan global.
- Penting bagi komunitas global untuk berkomitmen penuh terhadap keadilan dalam mengatasi perubahan iklim. Komunitas Muslim global harus memastikan bahwa prinsip Tanggung Jawab Umum namun Berbeda dan Kemampuan Masing-Masing (CBDR-RC) ditegakkan.
- Menegaskan bahwa negara-negara Barat memikul tanggung jawab historis dan realistis yang berat terhadap perubahan iklim. Emisi gas rumah kaca dalam skala global dapat ditelusuri kembali ke industrialisasi di Barat. Negara-negara maju secara historis mengikuti model pembangunan yang ekstensif, menghasilkan sebagian besar emisi karbon dioksida dan gas rumah kaca global.

Data menunjukkan bahwa sejak awal Revolusi Industri pada pertengahan abad ke-18 hingga tahun 1950, negara-negara maju mengeluarkan 95 persen total



karbon dioksida dunia, dan dari tahun 1950 hingga 2000, emisi yang dihasilkan oleh negara-negara maju menyumbang 77 persen emisi global. total. Selain itu, sebuah penelitian yang dipimpin oleh University of Leeds, yang diterbitkan pada bulan Juni 2023 di jurnal Nature Sustainability, mengungkap bahwa hampir 90 persen kelebihan emisi karbon berasal dari negara-negara maju.





### III. HASIL-HASIL YANG DICAPAI

Konferensi PUIC ke-18 dengan tema *Climate Change in the World: How Can PUIC Member States Respond?* Secara umum berjalan lancar.

Sidang menghasilkan dokumen-dokumen seperti:

1. Abidjan Declaration of the 18<sup>th</sup> PUIC Conference;
2. Report and Resolutions of the 10<sup>th</sup> Meeting of the Standing Specialized Committee on Political Affairs and Foreign Relations
3. Report and Resolutions of the 10<sup>th</sup> Meeting of the Standing Specialized Committee on Economic Affairs and Environment
4. Report and Resolutions of the 10<sup>th</sup> Meeting of the Standing Specialized Committee on Human Rights, Women and Family
5. Report and Resolutions of the 10<sup>th</sup> Meeting of the Specialized Standing Committee on Cultural and Legal Affairs and Dialogue of Civilizations and Religions
6. Report of the 12<sup>th</sup> meeting of the Standing Committee on Palestine
7. Final Report of the 11<sup>th</sup> Conference of Muslim Women Parliamentarians
8. Report of the 5<sup>th</sup> meeting of the PUIC Association of Secretaries-General
9. Report of the 25<sup>th</sup> Session of the PUIC General Committee
10. Approved PUIC Budget for the year 2024
11. Report of the 50<sup>th</sup> and 51<sup>st</sup> PUIC Executive Committee
12. Final Report of the 18<sup>th</sup> Session of PUIC Conference
13. Elected Members of the Executive Committee and the four Standing Specialized Committees.





## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. KESIMPULAN

1. Konferensi PUIC ke-18 yang diselenggarakan pada tanggal 2-5 Maret 2024 di Abidjan, Pantai Gading, telah berlangsung lancar. Sidang ini telah berhasil mengesahkan dan memperbarui resolusi-resolusi di komite-komite terkait sebagaimana telah disampaikan dalam dokumen ini.
2. DPR RI dalam Konferensi PUIC ke-18 DPR RI akan menjabat sebagai Presiden PUIC ke-19 sebagai kapasitasnya tuan rumah Konferensi PUIC ke-19 di Indonesia.
3. DPR RI memberikan pandangan dan intervensi serta masukan substantif terhadap resolusi-resolusi yang diadopsi PUIC.
4. Partisipasi Delegasi DPR RI dalam Konferensi PUIC ke-18 ini merupakan wujud nyata komitmen DPR RI dalam mendukung dunia yang aman, adil dan sejahtera, yang dapat berkontribusi positif bagi masyarakat Indonesia.

### B. SARAN

1. Hasil Konferensi PUIC ke-18 yang menghasilkan keputusan dan dokumen-dokumen penting, termasuk resolusi yang memerlukan implementasi dari masing-masing parlemen dan pemerintah negara-negara anggota PUIC. Oleh karena itu, resolusi yang telah disepakati penting untuk diketahui dan diberikan oleh Komisi-Komisi terkait di DPR RI untuk disampaikan ke Departemen/ Institusi/ Kementerian terkait untuk ditindaklanjuti secara bersama.
2. Delegasi DPR RI termasuk Sekretariat DPR RI perlu melakukan rapat secara intensif terkait persiapan partisipasi berbagai agenda PUIC selanjutnya, termasuk membahas untuk memperbarui resolusi-resolusi yang telah diadopsi sebelumnya dan komitmen menyertakan delegasi anggota perempuan.
3. Mengingat penyelenggaraan Konferensi PUIC ke-19 akan diselenggarakan di Indonesia, DPR RI perlu secara lebih dini menyiapkan diri lebih matang untuk menjadikan organisasi PUIC lebih solid, terorganisasi, dan efektif.





## V. PENUTUP

### A. UCAPAN TERIMA KASIH

Delegasi DPR RI menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran tugas Delegasi sehingga misi Delegasi di Konferensi PUIC ke-17 dapat berjalan lancar dan sukses.

Ucapan terima kasih disampaikan khususnya kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Dakar, Senegal, dan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia atas dukungan substansi dan pendampingan selama persidangan.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Biro Kerja Sama Antar Parlemen Sekretariat DPR RI.

Jakarta, 27 Maret 2024  
Ketua Delegasi / BKSAP DPR RI



**Dr. Fadli Zon**





Produced by:

COMMITTEE FOR INTER-PARLIAMENTARY COOPERATION  
INDONESIAN HOUSE OF REPRESENTATIVES  
(BKSAP DPR RI)

Email: [biro\\_ksap@dpr.go.id](mailto:biro_ksap@dpr.go.id)

Phone: (62-21) 5715813

[ksap.dpr.go.id](http://ksap.dpr.go.id)



@bksapdpr



@bksapdpr



bksapdpr



bksapdpr